PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR

Fahmi Idris, Isnawati, S. Roy Hendrayanto

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail : fahmi21.untag@gmail.com

ABSTRAK.

Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pilkada. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada sangat dipengaruhi oleh sejauh mana KPU mampu menyelenggarakan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan intervensi politik. Tingkat partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh efektivitas kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat kepala daerah. Penelitian ini akan menjawab ketentuan hukum yang mengatur peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur dan faktor hukum yang mendukung dan menghambat upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur. Menggunakan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan penelitian dan bahan analisis. Hasil pembahasan dan penelitian adalah bahwa KPU memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dan KPU memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan

yang partisipatif, transparan, dan adil. KPU perlu memperkuat sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pilkada. Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan infrastruktur pemilu di daerah yang sulit dijangkau serta menanggulangi praktik politik uang melalui pengawasan yang lebih ketat.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Masyarakat.

THE ROLE OF THE KPU IN INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN THE ELECTION OF REGIONAL HEADS IN EAST KALIMANTAN

ABSTRACT

The role of the KPU in increasing public participation is closely related to transparency and accountability in the implementation of the regional elections. Public trust in the election process is greatly influenced by the extent to which the KPU is able to hold elections that are free from fraud, manipulation, and political intervention. The level of voter participation is also influenced by the effectiveness of campaigns and socialization carried out by regional head

candidates. This research will answer the legal provisions that regulate the role of the KPU in increasing public participation in the election of regional heads in East Kalimantan and the legal factors that support and hinder the KPU's efforts to increase public participation in the election of regional heads in East Kalimantan. Using normative legal research as literature law research by using various literature as research materials and analysis materials. The results of the discussion and research are that the KPU plays a very important role in the implementation of the Regional Elections, especially in increasing public participation. Based on existing legal provisions, the KPU has the obligation to hold participatory, transparent, and fair elections. The KPU needs to strengthen socialization and voter education, especially in remote areas, to increase public understanding of the importance of the Regional Elections. In addition, there needs to be further efforts to improve election infrastructure in hard-to-reach areas and tackle the practice of money politics through stricter supervision.

Keywords: *General Election Commission, Regional Head Election, Community Participation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah yang signifikan dengan kondisi geografis yang sebagian besar terdiri dari hutan dan perbukitan. Hal ini menyebabkan beberapa daerah sulit dijangkau oleh penyelenggara pemilu, terutama dalam menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa salah satu tugas KPU adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan hak pilih. Namun, implementasi tugas ini di daerah dengan aksesibilitas rendah masih menjadi tantangan besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab tidak hanya pada pelaksanaan teknis pemilu, tetapi juga pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan dinamika politik yang kompleks, menghadapi tantangan tersendiri dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam pilkada. Tantangan ini mencakup penyebaran informasi yang merata di daerah terpencil, apatisme politik masyarakat, dan pengaruh kuat elite politik lokal.

Di sisi lain, apatisme politik masyarakat juga menjadi hambatan yang signifikan. Sebagian masyarakat di Kalimantan Timur masih menganggap bahwa suara mereka tidak memiliki dampak besar terhadap perubahan politik atau pembangunan di daerah mereka. Apatisme ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, kekecewaan terhadap kinerja pejabat

terpilih, atau kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.¹ Dalam konteks ini, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program inovatif yang dapat menjangkau semua kelompok, termasuk pemilih muda, perempuan, dan masyarakat adat.

Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pilkada. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada sangat dipengaruhi oleh sejauh mana KPU mampu menyelenggarakan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan intervensi politik. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa KPU wajib bersikap independen, transparan, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Di Kalimantan Timur, beberapa kasus dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara. Selain itu, pendidikan pemilih merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan KPU untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat. Pendidikan pemilih tidak hanya berfokus pada informasi teknis tentang bagaimana memilih, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang pentingnya hak pilih dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih. Namun, implementasi peraturan ini membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan Timur.

Dalam konteks Kalimantan Timur, masyarakat adat juga menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian khusus dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilu. Masyarakat adat memiliki dinamika sosial dan budaya yang unik, yang sering kali menjadi tantangan dalam integrasi mereka ke dalam sistem demokrasi modern. Untuk itu, KPU perlu menyusun strategi khusus yang berbasis kearifan lokal, seperti melibatkan tokoh adat dalam kampanye sosialisasi dan menggunakan bahasa lokal dalam materi pendidikan pemilih. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk

¹ Rahman, A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.hlm.36

masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Tingkat partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh efektivitas kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat kepala daerah. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai aturan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat memecah belah masyarakat.² Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang penggunaan isu-isu SARA dalam kampanye, yang sering kali menjadi penyebab konflik sosial di beberapa wilayah. KPU di Kalimantan Timur perlu memastikan bahwa kampanye dilakukan secara damai dan mendidik sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pilkada.

Selain itu, keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan dan pemilih pemula, juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilu. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan di Tengah Pandemi COVID-19 memberikan pedoman khusus untuk menjamin aksesibilitas dan partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk di masa-masa sulit seperti pandemi.³ KPU di Kalimantan Timur

perlu mengadaptasi strategi ini sesuai dengan kondisi lokal untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, penting untuk mengkaji peran KPU secara yuridis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi, efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa depan.⁴ Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, penting untuk mengkaji peran KPU secara yuridis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif

² Cangara, Hafied. 2018. *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*, Penerbit: Rajawali Pers Depok.hlm.13

³ ⁴ Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang*

Pemilihan di Tengah Pandemi COVID-19. KPU, Jakarta. Hlm.52

⁴ ⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.hlm.32

mengenai kendala yang dihadapi, efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa depan.⁵ Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur ?
2. Apa saja faktor hukum yang mendukung dan menghambat upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur ?

C. Metode Penelitian⁵

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan

⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 3) PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 4) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Timur.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana fundamental dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Keberhasilan Pilkada sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, dan dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran sentral. Peran KPU dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan teknis pemilu, tetapi juga mencakup upaya peningkatan partisipasi pemilih melalui pemutakhiran data, sosialisasi, dan penyediaan akses informasi yang inklusif.

Secara yuridis, peran dan kewenangan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pemilu. Di Kalimantan Timur, tantangan geografis dan kesenjangan akses informasi menjadi hambatan utama dalam menjangkau pemilih, khususnya di wilayah terpencil. Selain itu, rendahnya kesadaran politik dan partisipasi pemilih muda menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih

inovatif dan edukatif dari KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi yang efektif.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, KPU Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya strategis, termasuk pemanfaatan media digital dan konvensional, penyuluhan tatap muka, serta peningkatan aksesibilitas pemungutan suara. Pendidikan pemilih dan pemutakhiran data secara berkala menjadi prioritas untuk memastikan inklusi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kalimantan Timur akan meningkat, sehingga proses demokrasi berjalan lebih representatif dan berkeadilan.

B. Faktor Hukum Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Timur

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan langsung pemimpinnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada bukan hanya menjadi proses administratif semata, melainkan juga refleksi partisipasi aktif warga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, partisipasi

masyarakat dalam Pilkada masih menjadi tantangan yang signifikan, khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Di Kalimantan Timur, KPU menghadapi dinamika geografis, sosial, dan hukum yang kompleks. Faktor hukum menjadi salah satu aspek strategis yang dapat berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

1. Faktor Hukum yang Mendukung Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

- a) Dasar Hukum yang Jelas dalam Pemilu. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan KPU (PKPU) memberikan dasar hukum yang kuat bagi KPU dalam menyelenggarakan Pilkada. Aturan ini mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, yang menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang sistematis.
- b) Peningkatan Akses Informasi. Pasal 47 UU Pemilu mengatur hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang memadai. KPU Kalimantan Timur meresponsnya dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan pusat informasi untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan. Ini membantu

masyarakat memahami proses pemilu dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

- c) Penyelenggaraan Pemilu yang Adil dan Transparan. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU dituntut untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem e-voting dan penghitungan suara daring menjadi upaya KPU untuk menjamin transparansi dan integritas proses pemilihan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

- d) Peraturan tentang Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan. Regulasi yang mewajibkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, seperti Pasal 68 UU Pemilu dan Pasal 10 UU Pilkada, menunjukkan perhatian hukum terhadap inklusivitas. Ketentuan ini mendorong keterwakilan yang lebih setara dan meningkatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

2. Faktor Hukum yang Menghambat Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

- a) Tantangan dalam Pendaftaran Pemilih. Meskipun diatur dalam Pasal 18 UU Pemilu, pencatatan data pemilih masih menghadapi tantangan,

terutama di daerah terpencil Kalimantan Timur. Keterbatasan akses terhadap informasi dan infrastruktur pendaftaran menyebabkan sebagian warga tidak terdaftar, sehingga partisipasi menjadi rendah.

- b) Ketidaktahuan Masyarakat tentang Proses Pemilu. Edukasi politik yang belum merata membuat sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya Pilkada. Pasal 26 UU Pemilu mewajibkan KPU melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, namun tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya membuat pelaksanaan edukasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
- c) Kurangnya Infrastruktur di Daerah Terpencil. Meski Pasal 62 UU Pilkada mewajibkan pemenuhan fasilitas pemilu, realitanya infrastruktur di wilayah pedalaman masih minim. Keterbatasan jalan, transportasi, dan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi penghambat langsung bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
- d) Politik Uang dan Praktik Kecurangan. Praktik politik uang yang dilarang dalam Pasal 149 UU Pemilu masih sering terjadi. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu,

tetapi juga menurunkan motivasi warga untuk berpartisipasi secara objektif. Kecurangan dalam proses pemilu pun menjadi faktor yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Secara keseluruhan, peran regulasi dan hukum dalam Pilkada di Kalimantan Timur memiliki dua sisi: mendukung melalui kepastian hukum dan transparansi, namun juga menghambat ketika implementasi regulasi tidak maksimal di lapangan. Oleh karena itu, KPU memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam kerangka demokrasi yang sehat dan inklusif.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan Pilkada yang partisipatif, transparan, dan adil di Kalimantan Timur. Peran ini didukung oleh dasar hukum yang kuat, keterbukaan akses informasi, serta regulasi yang mendorong inklusivitas, termasuk bagi kelompok rentan. Namun, KPU masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala geografis, rendahnya kesadaran politik masyarakat, masalah dalam pendaftaran pemilih, kurangnya infrastruktur di daerah

terpencil, dan maraknya praktik politik uang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif agar tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat meningkat secara signifikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arbi Sanit. 1990. Sistem Politik Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.

Affan Gaffar. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Cangara, Hafied. 2018. Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi, Penerbit: Rajawali Pers Depok.

Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi, PT. Refika Aditama, Bandung.

Haris, R. 2016. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.

Junaidi, H. 2020. Implementasi Sosialisasi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat di Daerah Terpencil. Penerbit Yogyakarta Press. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2020. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan di Tengah Pandemi COVID-19. KPU, Jakarta.

Mardikanto, P. 2014. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Konsep dan Praktik, Rajawali Press, Jakarta.

Mardani, D. 2019. Politik Uang dalam Pemilu: Sebuah Perspektif Hukum dan Demokrasi. Penerbit Universitas Indonesia, Depok.

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pratama, Y. 2020. Pemilu Indonesia: Aspek Legal dan Praktik Demokrasi. Gema Insani. Jakarta.

Rahman, A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.

Saiful Mujani. 2013. Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Demokrasi dan Perilaku Memilih di Indonesia. Mizan, Bandung.

Sihombing, L. R. 2021. Tantangan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemilih di Daerah Terpencil.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,
2006, Penelitian Hukum Normatif
: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suryadi, M. 2018. Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu: Teori
dan Praktek di Indonesia.
Rajawali Press, Jakarta.

Zulkieflimansyah, Zulkie. 2011.
Demokrasi dan Pemilu di
Indonesia: Perspektif Historis
dan Yuridis. RajaGrafindo
Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala
Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat.